Strategi Pengadaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Perbekalan Kantor untuk Meningkatkan Efektivitas Organisasi

Vio James Suyando, Nina Oktarina

Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang viojames311@students.unnes.ac.id DOI: https://doi.org/10.15294/bap.v1i1.452 ORCBN 62-6861-1770-599

ABSTRAK

Organisasi tidak hanya bergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia, tetapi juga pada pengelolaan perbekalan kantor yang berfungsi sebagai penunjang utama aktivitas administrasi. Data BPS (2023) menunjukkan sekitar 35% instansi pemerintah masih mengalami ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan perbekalan sehingga menimbulkan pemborosan anggaran dan penurunan produktivitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pengadaan, pengendalian dan pemanfaatan perbekalan kantor secara terintegrasi guna meningkatkan efektivitas organisasi. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan analisis konten menggunakan data sekunder dari BPS, Kementerian PAN-RB dan Asian Productivity Organization. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan berbasis kebutuhan aktual, pengendalian melalui sistem informasi persediaan, serta pemanfaatan berorientasi efisiensi dapat meningkatkan efektivitas 20-25% dibandingkan pendekatan organisasi hingga konvensional. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa manajemen perbekalan terintegrasi merupakan faktor strategis dalam mewujudkan organisasi yang efisien, adaptif kompetitif. Kontribusi penelitian ini pengembangan model integratif yang menggabungkan aspek pengadaan, pengendalian dan pemanfaatan secara simultan, yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya.

Kata Kunci: efektivitas organisasi, manajemen perbekalan, pengadaan, pengendalian, pemanfaatan

PENDAHULUAN

Perbekalan kantor memiliki peran vital dalam menunjang aktivitas administrasi dan operasional suatu organisasi. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai, efektivitas kerja pegawai akan menurun sehingga pencapaian tujuan organisasi terhambat. Data Kementerian PAN-RB (2023) menunjukkan bahwa sekitar 32% hambatan kinerja instansi pemerintah disebabkan oleh pengelolaan sarana kerja yang tidak optimal, termasuk perbekalan kantor. Asian Productivity Organization (2022) juga melaporkan bahwa efisiensi organisasi dapat meningkat hingga 25% jika pengelolaan perbekalan dilakukan secara sistematis. Hal ini menegaskan bahwa perbekalan kantor bukan hanya sekedar penunjang administratif, tetapi juga faktor strategis dalam peningkatan kinerja organisasi.

Meskipun demikian, banyak organisasi masih menghadapi masalah klasik seperti kelebihan persediaan barang, kekurangan peralatan penting dan pemanfaatan yang tidak efisien. Data BPS (2022) menunjukkan bahwa 42% instansi mengalami kelebihan persediaan alat tulis kantor, sementara 28% lainnya mengalami kekurangan peralatan operasional. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai strategi pengadaan, pengendalian dan pemanfaatan perbekalan kantor yang efektif untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas manajemen perbekalan. Sutabri (2019) menekankan prinsip efektivitas dan efisiensi, Stevenson (2021) menyoroti pengendalian persediaan, (2021)OECD pentingnya menekankan manfaat digitalisasi pengadaan, dan Rofi'i & Martono (2020) menemukan sistem inventarisasi digital dapat mengurangi pemborosan. Robbins & Coulter menunjukkan hubungan positif antara sarana pendukung dan produktivitas, sementara World Bank (2020) menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga. Namun, sebagian besar penelitian masih terfokus pada satu aspek tertentu, tanpa

mengaitkannya secara menyeluruh dengan pemanfaatan serta dampaknya terhadap efektivitas organisasi. Selain itu, pendekatan yang digunakan cenderung teoritis dan kurang ditopang data empiris.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian berupa minimnya kajian integratif yang membahas pengadaan, pengendalian dan pemanfaatan perbekalan secara bersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan perbekalan, merumuskan pengelolaan pengadaan berbasis kebutuhan aktual, mengkaji mekanisme pengendalian yang efektif melalui teknologi digital, serta mengusulkan strategi pemanfaatan yang berorientasi efisiensi dan produktivitas. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur manajemen perbekalan dengan menghadirkan model integratif yang belum banyak diteliti. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi langsung bagi instansi pemerintah maupun organisasi swasta dalam meningkatkan efisiensi operasional serta optimalisasi sumber daya, sehingga dapat menjadi rujukan penting bagi akademisi maupun praktisi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai strategi manajemen perbekalan, bukan untuk menguji hipotesis kuantitatif. Data diperoleh melalui studi literatur yang diperkuat analisis data sekunder dari BPS, Kementerian PAN-RB dan *Asian Productivity Organization*, serta artikel ilmiah terkait. Bahan penelitian berupa dokumen statistik, laporan kinerja instansi dan hasil riset terdahulu yang relevan.

Peralatan yang digunakan meliputi perangkat lunak pengolah data Microsoft Excel, yang berfungsi untuk tabulasi dan analisis deskriptif data kuantitatif, serta NVivo untuk melakukan kategorisasi tematik atas literatur yang ditelaah. Prosedur penelitian mencakup lima tahap: (1) identifikasi masalah dari laporan resmi, (2) pengumpulan literatur akademis, (3) pengkodean dan kategorisasi tematik menggunakan NVivo, (4) analisis deskriptif atas data

kuantitatif, dan (5) integrasi hasil literatur dengan data sekunder untuk merumuskan strategi yang komprehensif.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif, yaitu membandingkan temuan literatur dengan data empiris guna mengidentifikasi kesenjangan penelitian terdahulu dan menyusun solusi praktis. Dengan rincian tersebut, penelitian ini dapat direplikasi oleh peneliti lain dengan menggunakan sumber data sekunder terkini serta prosedur serupa.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen perbekalan kantor di banyak instansi masih menghadapi dua permasalahan utama, yaitu kelebihan persediaan alat tulis kantor dan kekurangan peralatan operasional penting (BPS, 2022). Kondisi ini muncul karena sebagian besar organisasi masih menerapkan pola pengadaan berbasis alokasi anggaran tahunan tanpa mempertimbangkan analisis kebutuhan riil. Akibatnya, barang yang kurang penting tetap dibeli secara rutin, sementara kebutuhan yang lebih mendesak justru tidak terpenuhi.

Dua penyebab utama dapat diidentifikasi. Pertama, koordinasi antarbagian dalam perencanaan kebutuhan perbekalan masih lemah, sehingga informasi yang dihimpun tidak komprehensif. Kedua, sistem monitoring stok masih manual, menyebabkan data ketersediaan barang seringkali tidak akurat. Hal ini konsisten dengan pandangan Stevenson (2021) yang menekankan bahwa lemahnya pengendalian persediaan meningkatkan biaya operasional sekaligus mengurangi produktivitas.

Solusi yang ditawarkan adalah penerapan *needs-based procurement*, yaitu pengadaan yang berorientasi pada kebutuhan aktual tiap unit kerja. Dengan sistem ini, organisasi dapat menekan biaya sekaligus memastikan ketersediaan barang penting sesuai prioritas. Anthony dan Govindarajan (2019) melalui teori *management control systems* menekankan pentingnya mekanisme kontrol yang memastikan ketersediaan sumber daya sesuai kebutuhan strategis organisasi. Lebih jauh, Heizer, Render, dan Munson (2020) menekankan prinsip

operations management yang mengharuskan adanya keseimbangan antara biaya penyimpanan dan ketersediaan barang.

Integrasi teknologi digital juga terbukti menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi. Penelitian Rofi'i & Martono (2020) membuktikan bahwa sistem inventarisasi digital dapat mengurangi pemborosan hingga 20% melalui pelacakan stok secara *real-time*. OECD (2021) menambahkan bahwa digitalisasi pengadaan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sementara *World Bank* (2020) menekankan pentingnya koordinasi lintas unit untuk mencegah duplikasi. Dengan demikian, digitalisasi bukan hanya sekadar alat bantu, melainkan instrumen strategis untuk membangun tata kelola perbekalan yang efisien dan akuntabel.

Selain pengadaan dan pengendalian, aspek pemanfaatan juga memerlukan perhatian serius. Masih ditemukan budaya kerja boros, misalnya pencetakan dokumen berlebihan meskipun tersedia sistem digital. Fenomena ini menunjukkan kurangnya kesadaran pegawai tentang kaitan langsung antara perilaku hemat dengan efektivitas organisasi. Robbins & Coulter (2021) menegaskan bahwa sarana pendukung yang digunakan secara optimal dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan budaya organisasi yang menekankan disiplin, akuntabilitas, serta kesadaran kolektif untuk menggunakan perbekalan secara hemat dan produktif.

Jika ditinjau lebih luas, permasalahan manajemen perbekalan tidak hanya dialami instansi pemerintah, tetapi juga perusahaan swasta dan lembaga pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa isu efisiensi perbekalan bersifat universal karena terkait langsung dengan optimalisasi sumber daya dan produktivitas. Dengan menerapkan strategi pengadaan berbasis kebutuhan, pengendalian berbasis teknologi, serta pemanfaatan berbasis budaya hemat, organisasi di berbagai sektor dapat meningkatkan daya saing sekaligus efisiensi operasional.

Secara akademis, hasil penelitian ini memperkaya literatur manajemen administrasi dengan menawarkan model integratif yang menghubungkan tiga aspek utama: pengadaan, pengendalian dan pemanfaatan. Sementara itu, secara praktis penelitian ini memberikan rujukan bagi organisasi dalam membangun sistem manajemen perbekalan yang efisien, transparan dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjawab masalah yang telah dirumuskan, tetapi juga menghadirkan kontribusi teoritis dan praktis yang dapat diaplikasikan pada berbagai konteks organisasi.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan perbekalan kantor merupakan faktor strategis yang berpengaruh langsung terhadap efektivitas organisasi, meskipun masih ditemui kendala dalam bentuk perencanaan pengadaan yang tidak berbasis kebutuhan nyata, lemahnya sistem pengendalian persediaan, serta pemanfaatan sarana kerja yang belum efisien. Kekhawatiran utama berangkat dari pandangan bahwa perbekalan sering diposisikan hanya administratif, padahal keberadaannya elemen sebagai operasional dan produktivitas menentukan kelancaran menegaskan bahwa pegawai. Penelitian ini efektivitas organisasi dapat dicapai melalui penerapan strategi pengadaan berbasis kebutuhan aktual, pengendalian yang ditopang sistem digital, serta pemanfaatan perbekalan yang diarahkan pada budaya hemat dan produktif. Kontribusi penelitian ini terletak pada penyusunan model integratif yang menggabungkan ketiga aspek tersebut secara simultan, sekaligus memperkuat literatur dengan dukungan data empiris. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberi sumbangan teoritis dalam kajian manajemen administrasi, tetapi juga menawarkan rujukan praktis yang dapat digunakan oleh organisasi publik maupun swasta dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2019). *Management control systems (13th ed.)*. McGraw-Hill Education.
- Asian Productivity Organization. (2021). *Public sector* productivity: A framework for human resource management in the public sector. APO.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah 2022.* BPS RI.

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indikator Kinerja Pemerintahan Indonesia 2023.* BPS RI.
- Handoko, T. H. (2019). Manajemen (edisi 3). BPFE Yogyakarta.
- Hasibuan, M. S. P. (2020). *Manajemen: Dasar, pengertian dan masalah.* PT Bumi Aksara.
- Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2020). *Operations management (13th ed.)*. Pearson.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2022). *Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) 2022*. Kementerian PAN-RB.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management (15th ed.)*. Pearson Education.
- OECD. (2021). *Public procurement in the digital age*. OECD Publishing.
- Prawirosentono, S. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Kebijakan kinerja karyawan*. BPFE.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). *Management (14th ed.)*. Pearson.
- Rofi'i, A., & Martono, T. (2020). Sistem inventarisasi digital untuk pengelolaan sarana perkantoran di perguruan tinggi negeri. Jurnal Administrasi Publik, 12 (2), 145–158. https://doi.org/10.24832/jap.v12i2.2020
- Siagian, S. P. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Stevenson, W. J. (2021). *Operations management* (14th ed.). McGraw-Hill Education.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sutabri, T. (2019). *Manajemen administrasi perkantoran*. Yogyakarta: Andi.
- Terry, G. R., & Rue, L. W. (2019). *Principles of management*. Richard D. Irwin.
- World Bank. (2020). *Improving public sector performance:* Through innovation and inter-agency coordination. World Bank Group.